



KEPAHIANG

SENIN, 16 AGUSTUS 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Defisit di APBDP Capai Rp 48,6 M

KEPAHIANG - Pemkab Kepahiang beberapa waktu lalu telah menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Perubahan TA 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang. Diketahui dalam APBDP TA 2021 defisit anggaran mencapai Rp 48,6 miliar.

Sebanyak 3 kebijakan dalam APBDP yang akan dijalankan Pemkab Kepahiang, meliputi mempertahankan pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berupa peningkatan PDRB masyarakat Kepahiang, kemudian laju inflasi pada kisaran 3 persen - 4 persen serta pengurangan

penduduk miskin berkisar antara 12,5 persen - 13,5 persen.

Dikatakan Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. IPU, sejumlah program yang telah tertuang dalam dalam prioritas dan plafon anggaran telah mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dengan harapan bisa tepat sasaran dan sesuai anggaran yang tersedia hasil kesepakatan antara Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Prioritas dan plafon anggaran tahun 2021 yang akan dibahas dan disepakati dijadikan sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Pemkab Kepahiang," kata Bupati.

Adapun proyeksi anggaran APBDP 2021 diantaranya pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 784,4 miliar dengan belanja daerah Rp 836,7 miliar. Selanjutnya, terdapat pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan berupa Silpa sebelumnya sebesar Rp 582,3 juta. Selain itu juga terdapat penerimaan pinjaman daerah Rp 14,3 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran pokok pinjaman SMI sebesar Rp 11,2 miliar.

"Estimimasinya, pembiayaan netto Rp 3,6 miliar, dengan itupula terdapat defisit anggaran sebesar Rp 48,6 miliar," ungkap bupati.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepa-

hiang Andrian Defandra, SE, M.Si mengatakan, KUAPPAS yang telah disampaikan Pemkab Kepahiang melalui paripurna yang dilaksanakan akan diserahkan kepada Banggar DPRD Kepahiang untuk dilakukan pembahasan. Dalam pembahasan yang dilaksanakan dengan melibatkan TAPD Kepahiang tersebut tentunya dilakukan secara maksimal, mengingat adanya defisit tersebut.

"Banggar akan melaksanakan pembahasan secara maksimal bersama TAPD dan OPD mengingat besarnya defisit. Dengan adanya defisit, secara otomatis ke depan akan ada pemangkasan anggaran di sejumlah OPD untuk menutupinya," jelas Andrian. (sly)